

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Gunungkidul. 2020. *Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2020*.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul.
- CIFOR, 2012. *CIFOR dan Indonesia: Kemitraan untuk Hutan dan Masyarakat*.
Bogor : CIFOR.
- Departemen Kehutanan. 2003. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 305/Kpts-II/2003. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Indriati, T.R. 2009. *Pengaruh Dosis Pupuk Organik dan Populasi Tanaman Terhadap Pertumbuhan Serta Hasil Tumpang sari Kedelai (*Glycine max L.*) dan Jagung (*Zea mays L.*)*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Kartodihardjo H dan Jhamtani H. 2006. *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: PT. Equinox Publishing Indonesia.
- KTHKm Tani Manunggal. 2018. *Rencana Kerja Usaha Hutan Kemasyarakatan Periode 2018-2027*. Yogyakarta: Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- KTHKm Tani Manunggal. 2019. *Rencana Kerja Tahunan Hutan Kemasyarakatan Maju Makmur Tahun 2019*. Yogyakarta: Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- Mukyadi, Raden Mohamad, Surati & Kuncoro Ariawan. 2016. Kajian Hutan Kemasyarakatan Sebagai Sumber Pendapatan : Kasus di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 13 No. 1 April 2016, Hal. 13-23.

Pemerintah Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Putri, Dyah Puspita Nugraha. 2012. *PARTISIPASI KELOMPOK TANI HUTAN DALAM PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN (Studi Pada Kelompok Tani Hutan Tani Manunggal dan Sumber Wanajati III, Playen, Gunung Kidul)*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa) 2016-2021 Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul

Suharno. 2008. *Keterlibatan Multipihak Dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Yogyakarta*. Universitas Hassanudin. Makassar.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019.